

Implikasi Kewajiban Kepemilikan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Kemudahan Khusus Keimigrasian Untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Laut Indonesia = Implications of the Obligation of Possessing a Permit to Employ Personnel Foreign Work and Immigration Special Facilities for Employing Foreign Workers in the Indonesian Sea Territory

Muhammad Hanif Ramadhan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521430&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Keimigrasian). Adapun perizinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang didasari oleh UU Keimigrasian. Dalam tulisan ini terdapat studi kasus yang mengenai salah satu pemberi usaha perikanan yang melangsungkan usahanya dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut tidak menggunakan IMTA sebagai izin utama yang seharusnya diajukan kepada Kementerian berwenang melainkan hanya menggunakan Dahsuskim sebagai izin usahanya. Dalam studi kasus tersebut pada dasarnya terdapat permasalahan hukum atas penggunaan dua perizinan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penyelarasan atau harmonisasi atas dasar hukum seperti penggunaan asas hukum seperti *lex specialis*, *lex superior* serta *lex posterior* yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya IMTA dan Dahsuskim.

.....This study discusses the permits issued by the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration). The permits discussed in this study are Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) based on the Manpower Law and Special Immigration Facilities (Dahsuskim) which are based on the Migration Act. In this paper, there is a case study regarding a fishery business provider who runs his business using foreign workers and in running his business the business actor does not use IMTA as the main permit that should be submitted to the competent Ministry but only uses Dahsuskim as his business license. In the case study, basically there are legal problems over the use of the two permits. This study also discusses the method of harmonization or harmonization on a legal basis such as the use of legal principles such as *lex specialis*, *lex superior* and *lex posterior* which are the basis for the issuance of IMTA and Dahsuskim.